



Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Covid-19

Wilda Tri Yuliza^{1*}, Febriyanti Nursya²

^{1,2} Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Alifah Padang

*E-mail korespondensi: wildatriyuliza@gmail.com¹

ABSTRACT

Since the first time the Covid-19 case was reported in Indonesia, various policies and regulations for handling Covid-19 have been carried out by the government. However, the handling or handling of the Covid pandemic is considered still not effective enough. It is necessary to respond together and support each other in making efforts to prevent and overcome the impact of the Covid-19 pandemic to increase the success of government programs. This study aims to evaluate the implementation of the Covid-19 prevention program in Padang City in 2022. This study uses a descriptive qualitative method with a formative evaluation method. Research technique with in-depth interviews, observation, and document review regarding the Covid-19 prevention program. The analysis carried out is source triangulation and technique triangulation. The results showed that the implementation of the handling of Covid-19 in the Padang City Health Departement was running well and smoothly although there were still obstacles in the implementation of 5M, the implementation of the Covid-19 handling policy could be resolved properly and there was a decrease in cases from the previous months.

Keywords: Covid-19; Implementation; Program

ABSTRAK

Sejak pertama kali kasus Covid-19 dilaporkan di Indonesia beragam kebijakan dan regulasi penanggulangan penanganan Covid-19 telah dilakukan pemerintah. Namun, penanganan atau penanggulangan pandemi Covid dinilai masih belum cukup efektif. Perlunya disikapi bersama dan saling mendukung dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 untuk meningkatkan keberhasilan program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Kota Padang tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode evaluasi formatif. Teknik penelitian dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen mengenai program penanggulangan Covid-19. Analisis yang dilakukan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penanganan Covid-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang sudah berjalan dengan baik dan lancar meskipun masih ditemukan hambatan dalam penerapan 5M, penerapan kebijakan penanganan Covid-19 bisa teratasi dengan baik dan terjadi penurunan kasus dari bulan-bulan sebelumnya.

Kata kunci : Covid-19; Implementasi; Program

PENDAHULUAN

Sejak organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 Maret 2020, penyebaran Covid-19 di dunia terus meningkat. Kasus Covid-19 telah menyebar ke 229 negara dengan total terkonfirmasi positif sebanyak 470.839.754 kasus dan yang meninggal dunia sebanyak 6.092.933 kasus per tanggal 22 Maret 2022 (World Health Organization, 2022)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwasanya pada 22 Maret 2022 terdapat 5.974.646 kasus positif, 154.062 kasus meninggal dunia, dan 5.639.029 kasus berhasil sembuh. Kasus Covid-19 ini telah menyebar ke 31 provinsi di Indonesia. Salah satunya provinsi Sumatera Barat (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022)

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Maret 2022, perkembangan kasus Covid-19 di Sumatera Barat bertambah dengan total kasus 103.181 kasus positif Covid-19, terdapat 2.309 kasus meninggal dunia, dan sebanyak 97.287 kasus berhasil sembuh dari Covid-19. Kota Padang sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Barat sendiri sejak tahun 1 Januari 2022 sampai 21 Maret 2022 telah mencapai angka Covid-19 dengan 7.121 kasus positif Covid-19, 29 kasus meninggal dunia, 5.805 kasus berhasil sembuh, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang (Pemerintah Provinsi Sumbar, 2022)

Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi masalah kesehatan saja, namun juga berdampak pada bidang sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha sehingga dapat mengganggu produksi dan produktivitas. Oleh karena itu seharusnya kita sikapi bersama dan saling mendukung dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Ketika virus baru dengan potensi pandemi muncul, intervensi kesehatan sangat diperlukan dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran infeksi di masyarakat. Berbagai program dan kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka Covid-19 di Kota Padang. Diantaranya penerapan protokol kesehatan, penerapan 3T (*tracing, testing, treatment*), dan pelaksanaan vaksinasi Covid 19.

Sebagai salah satu bentuk evaluasi program penanggulangan covid (protokol kesehatan, 3T, dan vaksinasi) harus dilihat dari faktor-faktor input, proses dan output dimana ketiganya saling berkaitan. Ketiga dimensi itu berhubungan secara linear dan positif. Input yang baik memungkinkan proses baik, proses yang baik memungkinkan output yang baik, dan output yang baik akan membawa dampak terhadap outcome yang baik. Sebagai indikasi untuk menilai keberhasilan penanggulangan yang dapat dievaluasi untuk melakukan penyesuaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Kota Padang tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode evaluasi formatif Dilaksanakan pada bulan Mei - Juli 2022 di Kota Padang. Teknik penentuan informan secara *purposive sampling*. Teknik penelitian dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian berjumlah 5 orang yang dipandang mengetahui secara lebih luas dan berhubungan dengan penelitian serta dapat menjadi sumber data tentang apa yang diharapkan dari penelitian. Analisis yang dilakukan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik mengenai implementasi program penanggulangan Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indepth interview dilakukan pada lima informan yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dengan program dan berasal dari berbagai kategori, yaitu Tim Satgas Covid-19 Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggali informasi dari informan terkait evaluasi pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Kota Padang baik dari segi input (tenaga pelaksana, dana, sarana, kebijakan), proses (protokol kesehatan, 3T, vaksinasi) serta output

Tenaga Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, petugas kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang sudah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bahwa jenis tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 meliputi dokter, perawat, bidan, para medis dan non medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh informan berikut:

“ Semua petugas terlibat, karena disini kita emang bekerja semuanya, karena kita ada tracing lapangan, jadi semua petugas terlibat semua program itu kan ada gizi, kesling, promkes, perawat, bidan semuanya.” (Inf-4)

Ditinjau dari segi pelatihan ketenagaan, beberapa petugas kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang sudah diberikan pelatihan meskipun belum semuanya, untuk tenaga lain dilakukan diseminasi ilmu atau transfer ilmu. Hal tersebut diungkapkan oleh informan berikut:

“ Sudah , kita kan ada tenaga medis yang khusus menangani pasien langsung, nah

kalau untuk swab ada pelatihannya.” (Inf-1)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raynaldi, 2021) tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Selandia Baru. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat sudah sesuai dan mencukupi kebutuhan, semua pihak bekerja sama dalam pencegahan perluasan pandemi Covid-19 di wilayah tersebut (Raynaldi, 2021a).

Dana

Dari segi biaya yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 bersumber dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Dana tersebut digunakan untuk semua program yang ada di puskesmas lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan informan berikut:

“Dananya bersumber dari dinas kesehatan dan cara memperolehnya melalui SPJ”. (Inf-2)

Sejalan dengan penelitian (Herdiana, 2020) tentang Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai Upaya Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bahwa anggaran dalam penanggulangan Covid-19 selain dari aparaturnya yang memiliki kapasitas yang baik, anggaran yang digunakan untuk implementasi kebijakan PSBB dan penanggulangan Covid-19 berasal dari dana APBN dan APBD.

Sarana

Sarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan Covid-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang digunakan sesuai dengan fungsinya, namun untuk kebutuhan masing-masing puskesmas belum mencukupi dan masih ditemukan gangguan atau kesulitan, seperti gangguan

jaringan. Hal tersebut disampaikan oleh informan berikut:

“Kalau diawal-awal dulu tentu tidak cukup ya, karena apa kasus kita masih tinggi, asmatnya ga cukup, sarung tangannya ga cukup, tapi setelah kasus mulai, kemaren semuanya di Indonesia mungkin seperti itukan, karena lonjakan kasus, tapi seiring dengan berjalannya waktu semuanya normal” (Inf-3)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan. Pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan perlu disertai tata kelola yang baik. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi (Adisasmito, 2014)

Kebijakan

Kebijakan penanganan Covid-19 yang diterapkan yaitu sesuai dengan SK Pelayanan, SOP, PMK atau Kementerian Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kebijakan yang sudah diimplementasikan yaitu memakai masker, menjaga jarak mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan informan berikut ini :

“Ada SK pelayanan, SOP,PMK dan peraturan-peraturan” (Inf-1)

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan publik merupakan suatu arahan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan seluruh sektor atau perangkat pemerintahan dan menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik

diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (Adisasmito, 2014)

Protokol Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Padang sudah menghimbau seluruh puskesmas untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait aturan protokol kesehatan yaitu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan vaksinasi. Namun masih ada sebagian dari masyarakat yang tidak patuh terhadap prokes seperti tidak menggunakan masker saat datang ke puskesmas. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut:

“Sudah, karna kita menghimbau puskesmas untuk mengadakan penyuluhan dari promkes juga, pihak posyandu juga untuk menyebarkan informasi itu” (Inf-2)

Hal ini sejalan dengan penelitian (Arif Sofianto, 2021) tentang pemahaman dan implementasi masyarakat tentang protokol kesehatan Covid-19 di Jawa Tengah, Indonesia bahwa indikator protokol kesehatan Covid-19 dan menjaga daya tahan tubuh mengacu pada PMK revisi ke-5 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, serta Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020.

3T

Pelacakan atau *tracing* Covid-19 di lingkungan puskesmas dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, RT/RW, dan masyarakat dimana pelacakan dilakukan dengan melakukan wawancara melalui telepon atau bertemu langsung dengan pasien/masyarakat yang kontak dengan pasien Covid-19. Sedangkan pemeriksaan (*testing*) Covid-19 yaitu swab dan rapid test sesuai target, *treatment* dilakukan untuk pasien dan kontak erat. Kontak erat di karantina dan dilakukan

pemantauan gejala selama 14 hari pada kontak erat. Jika muncul gejala dilakukan tes swab dan jika tidak maka karantina pada kontak erat dianggap selesai, apabila hasil tes swab positif, dilakukan rujukan dan tes swab lagi dan isolasi dan jika hasil 2x negatif maka dilakukan isolasi dan pemantauan selesai. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut:

“Melakukan koordinasi dengan dinkes, koordinasi dengan tingkat RT atau RW, komunikasikan dengan petugas/masyarakat. Wawancara melalui telepon untuk mencegah terjadinya penularan, jika harus bertemu langsung, lakukan diluar ruangan/tempat terbuka, menggunakan APD yang sesuai, cuci tangan atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah wawancara, dan pastikan tidak menyentuh barang disekitar kontak erat. Nah, jika sudah dilakukan wawancara, selanjutnya identifikasi kontak erat, orang-orang yang berkontak erat dengan kasus konfirmasi sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari setelah timbul gejala klinis, apabila kontak erat sudah ditentukan, kontak erat tersebut dihubungi atau langsung melalui kunjungan rumah, kemudian kontak erat di karantina dan pemantauan gejala selama 14 hari, jika muncul gejala dilakukan tes swab dan jika tidak bergejala kontak erat selesai karantina 14 hari sejak kontak terakhir, apabila hasil tes swab positif, dilakukan rujukan dan tes swab lagi dan isolasi, dan jika hasil 2x negatif, maka dilakukan isolasi dan pemantauan selesai.” (Inf-1)

Hal ini sejalan dengan penelitian (Yakhamid & Zaqi, 2021) tentang Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19 bahwa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam bentuk penguatan 3T yakni *testing*, *tracing* dan *treatment*. *Testing* ditargetkan hingga sesuai dengan *positivity rate*, *testing* dilakukan dengan genose, swab antigen dan swab PCR.

tracing kasus ditargetkan 15 kontak erat per kasus konfirmasi, *treatment* yang diberikan harus sesuai dengan berat gejala.

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan dalam 3T yaitu masyarakat ada yang tidak mau tes dan tidak melapor saat timbul gejala, masyarakat tidak terbuka terkait informasi kontak erat dan kondisi kesehatannya. Hal ini terjadi karena adanya stigma negatif di masyarakat terkait Covid-19. *Tracing*, *testing* dan *treatment* merupakan sebuah upaya atau tindakan untuk memutus rantai penularan Covid-19 dengan melakukan tes (*testing*) untuk memastikan positif Covid-19, penelusuran kontak erat (*tracing*) sebagai upaya untuk mengetahui orang yang terinfeksi Covid-19 dan tindak lanjut berupa perawatan (*treatment*) untuk orang yang memiliki gejala atau positif Covid-19 dapat dilakukan dirumah secara mandiri di RS/ sesuai tingkat gejala penderita Covid-19.

Saran untuk kedepan, agar lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengetahuan masyarakat, agar tidak menolak untuk melakukan pemeriksaan Covid-19 serta segera melaporkan kondisi apabila muncul gejala Covid-19.

Vaksinasi

Dinas Kesehatan Kota Padang menginstruksikan pelaksanaan vaksinasi 3x dalam seminggu yaitu pada Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Capaian vaksinasi di Kota Padang sudah mencapai target lebih dari 70% yang sebelumnya hanya dibawah 50 %. Serta informasi terkait vaksin sudah dilakukan di semua puskesmas di kegiatan luar dan dalam gedung. Hal ini seperti informasi dari informan berikut :

“ 3 kali seminggu sesuai dengan aturan dari dinas kesehatan.” (Inf-1)

Vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan

kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.

Berdasarkan telaah dokumen Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin Covid-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Output

Pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Kota Padang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Adanya penerapan program dan kebijakan penanggulangan Covid-19 membuat pasien covid bisa teratasi dengan baik dan terjadi penurunan kasus dari bulan-bulan sebelumnya seperti dari bulan Maret sampai Juli 2022. Berdasarkan data Dinas kota Padang tahun 2022 pada bulan Maret ada penambahan 31 kasus baru dan menurun pada bulan Mei 2022 menjadi 6 kasus baru, selanjutnya menurun lagi pada bulan Juli sebanyak 2 kasus baru. Meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaan program dalam penerapan 5M seperti masyarakat susah diatur, tidak menggunakan masker saat berkunjung ke puskesmas dan kurangnya kesadaran untuk melakukan vaksinasi. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut:

“Sudah, sudah berjalan dengan lancar, banyak target yang sudah terpenuhi.”
(Inf-1)

Hasil dari penerapan kebijakan penanganan Covid-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang membuat kasus Covid-19 menurun dari bulan-bulan sebelumnya, ada kemajuan yang didapatkan oleh Kota Padang karena adanya koordinasi dengan puskesmas, tokoh masyarakat dan

lembaga lain yang membuat perubahan menjadi lebih cepat. Selain itu adanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat yang tidak taat aturan juga membantu dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19.

Harapan untuk ke depannya agar penerapan kebijakan penanganan Covid-19 dapat dipatuhi oleh semua masyarakat agar kebijakan yang berlaku dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat dalam penurunan kasus Covid-19.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penanganan Covid-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang sudah berjalan dengan baik dan lancar baik dari segi input seperti tenaga pelaksana, dana, sarana dan kebijakan. Baik dari segi proses seperti petugas kesehatan sering melakukan 3T pemeriksaan tentang Covid-19 dan vaksinasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang, masyarakat sudah mengetahui tentang protokol kesehatan meskipun masih ditemukan hambatan dalam penerapan 5M, dan dari segi output penerapan kebijakan penanganan Covid-19 bisa teratasi dengan baik dan terjadi penurunan kasus dari bulan-bulan sebelumnya. Harapan untuk ke depannya agar penerapan kebijakan penanganan Covid-19 dapat dipatuhi oleh semua masyarakat agar kebijakan yang berlaku dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat dalam penurunan kasus Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ikhlas Padang dan STIKes Alifah Padang atas dukungannya baik secara materil maupun non materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, W. (2014). *Sistem Kesehatan* (Edisi Kedua). Rajawali Pers.
- Arif Sofianto. (2021). Pemahaman Dan Implementasi Masyarakat Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 Di Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(1), 80–103.
- Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
<https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>
- Pemerintah Provinsi Sumbar. (2022, Maret 24). *Data Pantauan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat*. Tim IT DISKOMINFO Provinsi Sumbar.
- Raynaldi, R. F. (2021a). Analisis implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Selandia Baru. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 160–179.
<https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.160-179.2021>
- Raynaldi, R. F. (2021b). Analisis implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Selandia Baru. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 160–179.
<https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.160-179.2021>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022, Maret 24). *Situasi Covid-19 Nasional*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
<https://covid19.go.id/situasi>
- World Health Organization. (2022, Maret 24). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. World Health Organization. <https://covid19.who.int/>
- Yakhamid, R. Y., & Zaqi, N. A. R. (2021). Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 235–244.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.848>